

KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KBK-KKNI) (MODEL REKONSTRUKSI MADIN)

Abdurrahman

STAI Al-Qolam Gondanglegi Malang
abdurrahman@staiqolam.com

ABSTRACT

Attempts to match the profiles of graduate with the level of competence in accordance to KKNI (*Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia/ Indonesian Qualification Framework*) which is issued in 2012, raised a question how about the competence of graduate from *Madrasah Diniyah* (Religious School). With its large quantity, the position of *Madrasah Diniyah (Madin)* is still on the sideline. This is due to its conventional approach and exclusiveness. Therefore, developing the potential of Madin institutionally through curriculum reconstruction is urgently needed. The writer found that the KBK KKNI can be the right instrument for this purpose, because the tracer study results are based on the profile of the profession which will directly give impact on institutional development.

Kata Kunci: KBK, KKNI, Kurikulum, Model Rekonstruksi, Madin

Pendahuluan

Wacana pendidikan di Indonesia makin mencanangkan pendidikan yang berpusat pada upaya peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) di kancah globalisasi. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa manusia Indonesia, secara makro, belum memiliki kompetensi yang dapat menempati pos-pos yang sebenarnya masih banyak dibutuhkan di tanahnya sendiri, sehingga kemudian SDM Indonesia masih mendominasi tingkat operator atau buruh, dan harus mengikuti konsep dan aturan yang dibuat oleh SDM asing¹. Regulasi paling mutakhir terkait hal ini, adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diberlakukan sejak penerbitan Peraturan Presiden nomor 08 tahun 2012, pada tanggal 17 Januari 2012. Regulasi ini bertujuan untuk menyandingkan, menyelaraskan dan mensinergikan sektor pendidikan, baik formal maupun nonformal dalam rangka pemberian pengakuan dan penghargaan terhadap kompetensi kerja bidang apapun, termasuk sebenarnya profesi sosial keagamaan.

¹ Dalam kancah persaingan global, menurut laporan terakhir *Global Competitiveness Index* (GCI) yang dikeluarkan oleh Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum*) yang berpusat di Jenewa Swiss pada Selasa 1 Oktober 2013, menyatakan bahwa Indonesia menempati urutan 50 dari 144 negara dengan score 4,40, dan masih di bawah beberapa Negara Asia; Singapura (2), Malaysia (25), Brunai (28), Cina (29) dan Thailand (38). Lihat: World Economic Forum, *The Global Competitiveness Report 2012–2013*, (Jenewa: World Economic Forum, 2012) hal. 15

Rancangan KKNI ini didasarkan pada kemampuan lembaga pendidikan (*supply push*) yang khas Indonesia dan menyelaraskannya dengan masyarakat pengguna (*demand pull*) secara global, sehingga merujuk dan mempertimbangkan kerangka kualifikasi yang digunakan beberapa Negara lain, seperti European Qualification Framework (EQF) dan Australian Qualification Framework (AQF). Rujukan terhadap beberapa kerangka kualifikasi beberapa Negara hanya sebatas pertimbangan dan mungkin ada beberapa hal yang dapat diadopsi dan kemudian tetap harus disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Dalam hal penjenjangan misalnya, Indonesian Qualification Framework (IQF) dengan 9 jenjang, lebih tinggi dari Hongkong (7 jenjang) dan Eropa (8 jenjang), dan lebih rendah dari Selandia Baru (10 jenjang) dan Australia (11 jenjang). Di Australia, AQF menerapkan pemisahan pendidikan vokasi (*vocational education and training, VET*) dari pendidikan tinggi (*Higher Education Sector*), yang hal ini tidak boleh diaplikasikan di Indonesia karena melanggar UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003.²

Realitas kekosongan atau kekurangan SDM yang seharusnya disiapkan oleh lembaga pendidikan untuk menempati suatu profesi, yang kemudian diisi oleh SDM asing, atau lebih parah kemudian terisi oleh SDM yang sebenarnya tak memenuhi kualifikasi sama sekali, sebenarnya merupakan tanggungjawab bersama semua pihak. Laporan terakhir Indeks Pembangunan Manusia, IPM (*Human Development Index, HDI*) yang dirilis oleh United Nation Development Program (UNDP), dan diterima pada Selasa 19 Maret 2013, menyatakan bahwa Indonesia masih berada di kategori menengah (*medium human development*) pada ranking 121 dari 186 negara dengan indeks 0,629. Rangka ini sebenarnya naik tiga digit dari tahun sebelumnya (2012), namun masih jauh dibawah beberapa Negara tetangga; Singapura (18), Brunai (30), Malaysia (64), Thailand (103) dan Filipina (114).³

Alih-alih pada sektor sosial keagamaan, yang notabene masih banyak belum memiliki Lembaga Jaminan Mutu (LJM) sebagaimana pada sektor industri, sehingga diharapkan Indonesian Qualification Framework (IQF, KKNI) ini menjadi solusi regulasi yang akan menggandeng sekaligus dunia pendidikan, asosiasi profesi, dan masyarakat pengguna. Misalnya, seorang Guru Agama di lembaga pendidikan formal, yang telah jelas tuntutan kualifikasi yang harus dipenuhinya dalam meniti karir dalam profesi tersebut dengan jaminan kualitas dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga jaminan mutunya, melalui Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2004. Namun bagaimana dengan output dari Madrasah Diniyah (Madin)?, atau lebih spesifik pertanyaan yang muncul; bagaimana dengan profesi lulusan Madrasah Diniyah? Sudahkah ada ukuran-ukuran tertentu yang menjamin kualifikasi dan kompetensinya? Atau malah justru Madin selama ini belum mampu memenuhi permintaan pangsa pasar profesi yang seharusnya? Yang kemudian berujung pada marjinalisasi lulusan Madin yang hanya dapat mengisi pos-pos “pinggiran”, dan tidak dapat berbuat

² Lihat: Fauzi Kromosudiro, “Konsep Dasar KKNI”, www.fauziep.com/konsep-dasar-kkni/ (diakses pada 27 Desember 2013)

³ Lihat: UNDP, *Summary Human Development Report 2013. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World*, (New York: UNDP, 2013) hal. 15-17

banyak terhadap misi diadakannya Madin itu sendiri? Dan masih banyak sekali pertanyaan seputar produk SDM Madin yang perlu didiskusikan dan menjadi bahan pemikiran bersama.

Mencari Akar Masalah

Sebenarnya kemana arah pendidikan di Madrasah Diniyah?, mungkin pertanyaan inilah yang menjadi kata kunci dari tulisan ini. Penulis merasa Madin sebagai lembaga pendidikan nonformal yang banyak sekali bertebaran di Indonesia, beberapa tahun terakhir ini seperti enggan hidup namun tak mau mati, termasuk Madin yang berada di Pesantren. Pada tahun 2011 – 2012, di Jawa Timur terdata 6.003 Pondok Pesantren, jumlah ini adalah 22.05% dari seluruh jumlah Pesantren di Indonesia yang berjumlah 27.230⁴. Namun walau dengan kuantitas yang relatif banyak, sebenarnya didominasi oleh lembaga-lembaga sampingan, dan kurang penting, ini secara kasat mata dapat terlihat dari penilaian masyarakat bahwa Madin adalah sekolah “pendamping” dari sekolah formal. Belum lagi masih banyaknya SDM seadanya, sehingga tidak hanya lemah pada aspek kurikulum, manajemen dan administrasi pengelolaan lembaga, Namun lebih dari itu, kadang Madin kehilangan tujuan, misi dan jati diri sebagai lembaga pendidikan yang mandiri, dan pada ujungnya mewujudkan lembaga yang mandul. Tahun 2011 – 2012, terdata 4.329.141 santri Madin seluruh Indonesia, terdiri dari 4.068.258 orang (93,97%) santri Ulā, 193.131 orang (4,46%) santri Wusthā, dan 67.752 orang (1,57%) santri ‘Ulyā. Santri yang mengikuti pendidikan formal berjumlah 4.306.263 orang (99,47%) dan santri yang tidak mengikuti pendidikan formal/tidak sekolah berjumlah 22.878 orang (0,53%). Jumlah santri pada jenjang Ulā yang bersekolah di MI/SD sebanyak 4.051.582 orang (99,59%) dan sebanyak 16.676 orang (0,41%) tidak bersekolah, jumlah santri pada jenjang Wusthā yang bersekolah di MTs/SMP sebanyak 188.295 orang (97,50%) dan sebanyak 4.836 orang (2,50%) tidak bersekolah, jumlah santri pada jenjang ‘Ulyā yang bersekolah di MA/SMA sebanyak 66.386 orang (97,98%) dan sebanyak 1.366 orang (2,02%) tidak bersekolah. Dan dari aspek tenaga pengajar, terdata sebanyak 295.771 orang. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, tenaga pengajar dengan pendidikan terakhir <S1 berjumlah 183.351 (61,99%), tenaga pengajar dengan pendidikan terakhir S1 berjumlah 67.206 orang (22,72%), dan tenaga pengajar dengan pendidikan terakhir ≥S2 berjumlah 45.214 orang (15,29%).⁵

Walaupun sebenarnya ada beberapa Madin yang patut diperhitungkan dan berkualitas, seperti Madin Sidogiri, Madin Ploso, Madin Lirboyo, dan Madin-Madin lain yang umumnya berada dibawah pengelolaan Pesantren besar. Dari

⁴Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kemenag RI, *Analisis dan interpretasi Data pada Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, dan TPQ tahun 2011 – 2012*, (Jakarta: Pendis, 2012) hal. 70. Menurut penelusuran sejarah, menjamurnya Madin dan Pesantren di Indonesia salah satunya didorong oleh sikap diskrimatif pemerintah Belanda yang menerbitkan aturan *wilde scholen ordonantie* pada tahun 1933. Lihat: H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Bandung: Rineka Cipta, 2004), hal. 169

⁵ *Ibid.* hal. 90, 92 dan 95

beberapa titik sisi kelemahan berikut, mungkin dapat menjadi pijakan kita menemukan akar masalah yang sebenarnya dalam tubuh Madin.

Konvensional

Model dan pola pembelajaran di Madin selama ini masih sangat konvensional dan manual. Pembelajaran model ini lebih menekankan pola-pola *teacher centered* yang sama sekali menekankan paradigma hanya guru sebagai subjek dalam kelas, dan murid adalah objeknya. Dengan pola ini, guru akan memberikan pengetahuan apapun sesuai seleranya, dan dengan cara apapun yang ia suka, sementara si murid diharuskan menerima begitu saja apapun yang disampaikan oleh sang guru, karena hanya guru yang paling benar dan tak terbantahkan dalam kelas, si murid juga harus menerima “perlakuan” apapun dari sang guru dalam mengajarkan ilmunya. Model ini sama sekali tidak memberikan ruang untuk *free will* bagi si murid, sehingga ia adalah benar-benar hasil cetak-paksa sang guru. Di Indonesia model ini masih digunakan secara resmi sampai pada akhir abad ke-19, dengan penerapan kurikulum 1994⁶. Baru pada awal abad millennium, dilakukan perubahan orientasi pembelajaran dengan pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004, dan dikembangkan menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006. Kurikulum ini dari sisi orientasi pembelajaran, menurut hemat penulis, sedikit banyak mengadopsi pandangan pendidikan berparadigma pembebasan orang tertindas (*freedom of oppressed*) yang dicetuskan oleh Paulo Freire (w. 1997)⁷. Ia menganggap, bahwa pola lama adalah pola penindasan terhadap anak didik, yang tidak memberikan peluang sama sekali kepada mereka untuk memberikan sekedar usulan mengenai suasana belajar, apalagi kritik terhadap pengetahuan yang diberikan oleh sang guru. Menurut Freire, anak didik harus dibebaskan sebebaskan-bebasnya memilih apa yang ingin ia pelajari, dan dengan cara apa ia mendapatkan pengetahuan itu, pendeknya paradigma Freire ingin menciptakan “surga” bagi anak didik.

Bukan berarti kemudian kita harus merubah orientasi pembelajaran di Madin sebagaimana pandangan Freire, sebab penulis juga tidak sepenuhnya sependapat dengan paradigma yang dibangun dalam gagasannya yang sama sekali bernuansa liberalisasi pendidikan menurut keinginan anak didik. Hal ini karena sesungguhnya Islam memiliki paradigma yang sesungguhnya lebih “emas” dari pada sekedar pandangan-pandangan berlabel “isme/isasi” manapun (*al-islāmu ya'lū walā yu'lā 'alaih*). Oleh karenanya kita perlu menggelar semangat

⁶ Perkembangan dan penerapan kebijakan pendidikan berupa kurikulum nasional di Indonesia sejak kemerdekaan, mulai kurikulum tahun 1947 (*separated subject curriculum*), kurikulum tahun 1968 (*correlated subject curriculum*), kurikulum tahun 1975 (*integrated curriculum organization*), kurikulum tahun 1984 (*content based curriculum*), sampai kurikulum tahun 1994 (*objective based curriculum*) masih sangat membebani peserta didik. Bahkan penerapan target kurikulum 1994 dikecam sebagai dosa Depdikbud yang menyebabkan kemerosotan kualitas pendidikan nasional.

⁷ Paulo Freire adalah tokoh pendidikan pembebasan orang tertindas kelahiran Brasil. Gagasannya mulai mendunia sejak ia mempublikasikan bukunya “Pedagogy of the oppressed” pada tahun 50-an. Pemikirannya tentang pendidikan pembebasan mulai diterima di Indonesia dengan semangat memerangi pendidikan dehumanisasi yang digadang-gadang kaum modernis. Lihat: Mansour Fakih, *Jalan Lain*, cetakan 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) hal. 107-127

respiritualisasi model orientasi pendidikan, *back to God (faruddūhu ila Allāhi)*, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur’ān dan Sunnah. Sebut saja misalnya prinsip-prinsip transformasi (*da’wah*)⁸, dogmatis (*wa’mur ahlaka*)⁹, diskusi (*syūrā*)¹⁰, *communication and dialog (tawāshaw)*¹¹ dan masih banyak lagi. Atau enam sendi paradigma pendidikan Qur’ani yang diidentifikasi oleh Abdullah Nashih Ulwan; keimanan (*tarbiyah imāniyah*), etika dan moral (*tarbiyah khuluqiyah*), jasmani (*tarbiyah jismiyah*), intelektualitas (*tarbiyah aqliyah*), mental (*tarbiyah nafsiyah*), dan sosial kemasyarakatan (*tarbiyah ijtīmā’iyah*)¹². Namun, Madin selama ini masih jauh dari orientasi pembelajaran ideal islami sebagaimana kita ketahui. Model yang digunakan masih cenderung konvensional, manual dan sangat teoritik. Mungkin bahkan tidak terasa oleh pengelola dan anak didik, walaupun mereka sebenarnya telah terjebak dalam tempurung yang tertutup rapat. Pola yang *theory-centered* ini membuat pembelajaran yang jauh dari praktik, sehingga ujungnya jauh panggang dari api. Sebagai contoh; pada kelas-kelas tingkat dasar (*darajah ulā*) masih didominasi dengan pola *sorogan* dari pada *bandongan*¹³ yang sesungguhnya sangat tekstual (*teks-book centered*), bahkan pola ini terus dipertahankan sampai pada tingkat-tingkat selanjutnya (*darajah wushtā and darajah ‘ulyā*), sehingga kompetensi yang didapat oleh anak didik hanya seputar *moco tur murati*. Demikian pada kelas-kelas atas (*darajah ‘ulyā*), dengan pola *study of cases (bahtsul masāil)* yang sesungguhnya sangat kontekstual dan faktual, namun pada realitasnya hanya gegap gempita dalam forum, namun hambar dan bahkan kadang hilang tidak membekas sama sekali diluar forum. Penulis pernah menjadi mentor beberapa kelompok siswi kelas *ulyā* Madin Raudlatul Ulum 1 Putri Gajaran yang akan membahas hukum hijab pada sebuah gelaran Bahtsul Masail Propensi di Pesantren Ploso, beberapa tahun yang lalu. Walaupun masih dalam taraf pembelajaran, dalam diskusi tersebut, forum memutuskan bahwa jilbab yang selama ini dipakai oleh mayoritas muslimah Indonesia tidak memenuhi kriteria hijab dalam Islam, setidaknya dalam *madzhab* tertentu. Namun pada realitanya, seluruh delegasi yang kabarnya hanya memakai jilbab, tidak mampu melaksanakan pengetahuan yang mereka perjuangkan sendiri (baca: hasil ijtihad). Artinya ilmu yang mereka peroleh dalam forum itu hanya sebatas teori dan tidak menyentuh sama sekali alam praktis, walaupun sangat disadari bahwa ilmu itu untuk diamankan.

⁸QS. Al-Nahl: 125

⁹QS. Thāhā: 132

¹⁰QS. Al-Syūrā: 38

¹¹QS. Al-‘Ashr: 3

¹² Dikutip dari Ali Mudlofir, “Tafsir Tarbawi sebagai Paradigma Qur’ani dalam Reformulasi Pendidikan Islam”, *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 11 (November 2011), hal. 269-273

¹³ *Sorogan* dan *Bandongan* adalah pola pembelajaran yang dalam dunia Pesantren. Seorang Kyai/Guru membacakan kitab dihadapan Santri/Murid, dan murid hanya mendengarkan dan mencatat dari awal sampai akhir, ini disebut *Sorogan*. Sementara *Bandongan*, ketika Santri membaca dihadapan Kyai yang dengan seksama mendengarkan dan memberikan koreksi serta penjelasan-penjelasan tambahan, baik bacaan ini terbatas sesuai dengan hasil yang pernah dipelajari dari sang Kyai, atau lebih luas tida dibatasi, sehingga Santri dapat menambahkan penjelasan yang ia dari sumber lain.

Eksklusif¹⁴

*Dichotomy of the knowledge*¹⁵, mungkin inilah kata kunci dari kondisi “eksklusif” Madin sebagai lembaga pendidikan. Walaupun sudah lama dibantah, bahkan sejak awal kemunculannya pada akhir abad keemasan Islam, sekitar abad ke-11, namun sampai sekarang pengaruh dualisme ilmu ini masih melekat di benak kebanyakan kita, dan sering keluar dari bibir kita. Paradigma dikotomi ini makin mengucilkan lembaga-lembaga pendidikan Agama, seperti Pesantren dan Madin, yang dengan sekuat tenaga mempertahankan “kemurnian” ilmu Agama dari ilmu-ilmu umum. Makin banyak daftar Pesantren seperti ini yang dahulu besar, sekarang makin kecil. Hal ini, menurut penulis, disebabkan interpretasi mayoritas masyarakat bahwa ilmu Agama hanya untuk ibadah (baca: *ibādah mahdlah*), hanya seputar; solat, puasa, zakat, haji, dzikir, dan nikah serta waris, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan alam kehidupan mereka, seperti; bekerja, berdagang, bermasyarakat dan berpolitik. Ilmu agama dianggap hanya sekedar pengetahuan tentang tata cara ritual peribadatan semata, yang jika berkuat dan bergantung pada ilmu Agama saja, maka tidak akan mampu bersaing untuk meraih keberhasilan dalam bidang ekonomi, sosial atau politik, karena berada di wilayah yang sama sekali berbeda. Dalam bahasa yang mudah, seseorang akan bergumam, “*kate mangan opo, lèk mung ngaji nduk madrosah?*”. Jawaban dari “gumaman” penting ini, tidak boleh hanya sekedar, “*ojo kuwatir, rizki niku tanggungane sing kuwoso*”, sebab jawaban seperti ini tidak mengandung solusi sama sekali¹⁶. Lebih-lebih jika kemudian dihadapkan dengan

¹⁴ Eksklusifisme adalah pandangan bahwa hanya ada satu “jalan keselamatan” dan tidak ada peluang untuk menggunakan jalan lain. Pemahaman ini berkembang pada setiap agama. Dalam Islam salah satu perkembangannya adalah pandangan dikotomi ilmu. Harold Coward misalnya, menulis bahwa dari kajiannya tentang agama-agama, Islam adalah agama yang begitu jelas menonjolkan eksklusifisme. Lihat: Harold G. Coward, *Pluralism: Challenge to World Religions*, terjemahan, *Pluralisme: Tantangan bagi Agama-Agama*, (Jakarta: Kanisius, 1989). Di Indonesia, salah satu dampak negatif perlakuan diskriminatif pemerintah Belanda adalah sikap ortodoksi yang menjadikan Madin apatis dan sampai saat ini lamban dalam merespon peraturan dan kebijakan pemerintah. Lihat: Tilaar, *Paradigma Baru*, hal. 153

¹⁵ *Dichotomy of the knowledge* adalah pandangan bahwa ilmu pengetahuan harus dibedakan antara ilmu Agama dengan ilmu umum lainnya. Di barat, dikotomi ilmu lahir setelah terjadinya renaissance sebagai akibat dari perlawanan kaum intelektual terhadap dominasi dan supremasi gereja sebagai penentu kebenaran ilmiah. Dalam dunia Islam sendiri, pandangan dikotomi ilmumulai muncul pada akhir priode Abad Puncak Peradaban Islam (*Golden Ages*, abad ke-7 sampai ke-12). Antara lain terkait dengan batasan rasionalisasi teks Al-Qur’an yang dianggap telah merubah total kebudayaan Arab pra Islam (*al-mawrūs al-qadīm*), sebagaimana ditulis oleh al-Jabirī dalam Nalar Arab (*Takwīn al-‘Aql al-‘Arab*), sehingga memunculkan kecurigaan pada usaha rasionalisasi (*ta’wīl*) oleh kelompok filosof terhadap teks. Sebagaimana perseteruan antara timur dan barat, nalar normatif-dogmatis dan sufistik (*bayānī-‘irfānī*) di timur yang diwakili oleh pemikiran Al-Ghazzālī (1058-1111), dan nalar rasional-empiris (*burhānī*) di barat yang diwakili Ibn Rusyd. Lihat: M. Rusydi, “Wacana Dikotomi Ilmudalam Pendidikan Islam dan Pengaruhnya”, *Al-Banjari*, 9 (Januari-Juni, 2006), hal. 24-27 dan 41-46. Salah satu produk dikotomi saat itu adalah gagasan struktur kurikulum yang diwacanakan oleh Al-Ghazzālī dalam buku fenomenalnya “*Ihyā’ ‘Ulūmu al-Dīn*”.

¹⁶ Diriwayatkan, suatu ketika Khalifah ‘Umar ibn Khatthāb ra memarahi seseorang yang hanya berdiam diri di Masjid selama beberapa hari dan tidak mau bekerja dengan alasan bahwa rizkinya telah dijamin oleh Allah Swt (QS. Hūd: 6). sebab menurut ‘Umar, yang dimaksud dengan “*dābbah*” dalam ayat tersebut adalah mereka yang mau bekerja.

wacana sekulerisme Agama¹⁷ yang menggerogoti pemahaman Agama masyarakat secara komprehensif, dan pada ujungnya menghilangkan motivasi mereka untuk mempelajari ilmu Agama¹⁸.

Akibat dari pandangan dikotomi ini, dapat dilihat sekarang ini dari kondisi “memilukan” Madin. Secara kuantitatif, di daerah tertentu seperti Jawa Timur terutama wilayah Tapal Kuda, Madin memang banyak dan hampir dapat ditemukan di setiap Masjid, namun kecil-kecil dan relatif jauh dari kualitas. Mengesampingkan faktor dorongan aktualisasi diri, yang memotivasi banyak orang berkompetisi mendirikan Madin sendiri-sendiri, tidak peduli kecil dan dikelola ala kadarnya, *sing penting tèk dewe*, alih-alih dampak positifnya adalah terwujudnya banyak pilihan Madin di tengah masyarakat. Namun pada kenyataannya, Madin tetap menjadi lembaga pendidikan eksklusif, kelas khusus untuk golongan tertentu, dan hanya bagi yang mau saja. Dan pada umumnya meskipun sudah di dalam Madin, tidak banyak yang kemudian menganggap ilmu Madin itu penting mengalahkan yang lain, dan kemudian berbangga diri jika memperoleh prestasi di Madin, sama seperti kebanggaan pada bidang lain di luar Madin.

Mencari Solusi

Kenapa KBK KKNI?

Pada dasarnya, KKNI diawali oleh kegelisahan akademisi terhadap *output* lembaga pendidikan yang cenderung kurang memenuhi permintaan pengguna lulusan dalam dunia industri, yaitu berupa tenaga kerja dengan seperangkat *skill* dan kompetensi yang sesuai dengan pasar¹⁹. Sehingga tidak jarang, pengguna justru merekrut tenaga kerja dari luar lembaga pendidikan, namun dari jalur lain yang dapat memenuhi kompetensi dan *skill* yang disyaratkan. Namun demikian pada perkembangannya, setiap profesi dalam upaya mengisi kemerdekaan di Indonesia, mengharuskan adanya ketentuan kualifikasi yang jelas, sehingga dapat diperyanggungjawabkan kompetensi yang mestinya dimiliki oleh seseorang yang berprofesi tertentu dan kemudian dapat ditentukan penghargaan terhadap profesi tersebut secara professional dan proporsional.

¹⁷ Sekulerisme Agama adalah pandangan bahwa Agama tidak boleh mencampuri urusan keduniaan, seperti Hukum Tata Negara, Hukum Pertahanan Negara atau Hukum Ekonomi. Semuanya harus diatur menurut empiris dan logika rasional semata. Paham ini sebagaimana Freemason terinspirasi dari Roman Utopia “The New Atlantis”, karya Fancis Bacon (1561 – 1627) seorang ahli hukum dan filsafat berkebangsaan Inggris, yang menerbitkan buku kecil cerita roman itu pada tahun 1623 dalam Bahasa Latin.

¹⁸ Beberapa teori tentang motivasi sama sekali tidak menempatkan kebutuhan kehidupan bergama sebagai pendorong motivasi paling efektif untuk kemudian seseorang memilih ilmu Agama. Abraham H. Maslow misalnya dalam teorinya “Motivation and Personality”, menemukan bahwa kebutuhan paling primer justru *biological needs*.

¹⁹ Pada awalnya KKNI disusun oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak tahun 2003, sebelum kemudian dilimpahkan kepada Kemdikbud dalam satu tim khusus pimpinan Megawati Santoso. Lihat: Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja, “F.A.Q.”, www.penyelarasan.kemdiknas.go.id/home/faq.html (diakses pada 27 Desember 2013)

KKNI berbeda dengan kurikulum *link and match*²⁰ yang terlalu bersifat vokasional, sehingga tidak membuka peluang sama sekali pada seseorang yang menempuh jalur non-vokasi atau pendidikan formal keilmuan, apalagi nonformal, untuk masuk *nimbrung* dalam jalur kurikulum “eksklusif” tersebut. Kekuatan *link and match*, menurut penulis ada pada kejelasan penempatan *output* lembaga pendidikan vokasi pada lembaga-lembaga industri tertentu, seperti SMK Telkom di PT Telkom itu sendiri, sehingga lembaga pendidikan vokasi tak ubahnya hanyalah tempat pelatihan calon “pekerja pesanan”.

Penerapan KKNI dalam membangun struktur kurikulum Madin diharapkan dapat memperjelas penataan jenis dan jenjang pendidikan Madin, yang pada ujungnya akan berimplikasi pada penyeteraan SDM lulusan Madin, sehingga kualifikasi kompetensi yang dimiliki sesuai dan sinergi dengan profesi yang akan disandangnya di tengah masyarakat, dan dimungkinkan adanya usaha pengembangan sistem penjaminan mutu bagi profesi sosial keagamaan di Indonesia. Disamping itu, KKNI merupakan fasilitasi konstruksi pendidikan sepanjang hayat (*uthlubū al-'ilma min al-mahdi ilā al-laḥdi, long life education*).²¹

Kenapa KBK?, pertanyaan yang pasti muncul, sebab setelah KBK, setidaknya sudah ada dua model pengembangan kurikulum yang digunakan secara nasional di negeri ini; KTSP tahun 2006 dan Kurikulum 2013. KBK merupakan revolusi orientasi pembelajaran dalam bentuk regulasi bangunan kurikulum, dari kurikulum konvensional tahun 1994 yang masih *teacher centered*, menjadi KBK tahun 2004 yang berubah 180⁰ ke *student centered*. Sementara kurikulum setelahnya merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari KBK. KTSP tahun 2006, adalah model konstruksi kurikulum secara komprehensif dari akar stakeholder dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sehingga mencirikan tingkat satuan pendidikan, namun tetap bertumpu dan mengacu pada standar kompetensi yang ada pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)²². Dan Kurikulum 2013 adalah pengembangan KTSP melalui Permendikbud Nomor 81A tahun 2013 yang memuat pedoman penyusunan dan pengelolaan KTSP dalam salah satu dari lima lampirannya. Menilik hal ini, maka penggunaan KBK menjadi solusi yang ditawarkan makalah ini untuk menjadi

²⁰*Link and Match* adalah sebuah metode mensinergikan pendidikan vokasi terhadap permintaan pengguna lulusan, misalnya baru-baru ini SMK al-Khozini Ganjaran berencana akan membuka Prodi baru Keperawatan dan akan bekerja sama dengan RSI Gondanglegi, SMK kemudian menyesuaikan struktur kurikulumnya dengan kompetensi yang disyaratkan oleh RSI, setidaknya untuk menjadi Asisten Perawat. Metode ini dipopulerkan oleh Mendikbud Wardiman Joyonegoro pada tahun 1990-an. Pada era Wardiman ini, *Link and Match* betul-betul menjadi mantra sakti pada saat pendidikan dan dunia industri adalah dua dunia yang berbeda dan tak pernah saling menyapa. Dan saat ini, spirit *link and match* kembali digadang-gadang sebagai mantra kuat dalam bentuk Kurikulum 2013, atau sekedar pencitraan menuju tahun politik 2014.

²¹ Hendrawan Soetanto, Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam kaitannya dengan KKNI, *Slide Presentasi*, disajikan pada Lokakarya Pengembangan Kurikulum PTAIS KOPERTAIS IV Surabaya, tanggal 11 November 2013 (Sidoarjo: Hotel Utami, 2013) hal. 31

²²KTSP lahir seiring dengan UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sementara SI dan SKL ditetapkan berdasarkan regulasi kementerian terkait, dan untuk pendidikan formal di bawah Kemenag (Depag RI pada waktu itu), ditetapkan melalui Permenag RI nomor 2 tahun 2008.

instrumen metode rekonstruksi kurikulum Madin yang kemudian mengacu pada KKNI sebagai solusi instrument penentuan kualifikasi kompetensi profesi lulusan Madin nantinya. Lebih dari itu, menurut Prof. Hendrawan, kekuatan KBK KKNI adalah jika dihadapkan pada empat fenomena kompetensi yang wajib dimiliki oleh SDM lulusan dalam profilnya, yaitu terwujudnya; 1) manusia ImTaQ (*fenomena anthropos*), 2) menguasai IpTek (*fenomena tekne*), 3) hidup harmonis bersama masyarakat (*fenomena oikos*), dan 4) berperilaku sesuai dengan norma (*fenomena etnos*)²³.

Potensi Madin

Madin sesungguhnya memiliki potensi yang luar biasa, jika dikembangkan dengan baik. Inovasi pengembangan yang penulis maksud adalah rekonstruksi bangunan kurikulum yang mempertegas posisi Madin dan memperjelas profil SDM lulusannya kepada masyarakat pengguna. Dengan begitu, maka seluruh komponen “mesin” Madin, mulai dari cita-cita, visi, misi, tujuan, sampai rancangan program akan bekerja secara sistematis. Potensi yang luar biasa ini, sekarang ini sesungguhnya didukung oleh datangnya priode “reinkarnasi Agama”²⁴ sejak awal milenium abad ke-20 sampai abad ke-25.

Solusi untuk mengembangkan potensi Madin, dapat dimulai dengan melepaskan diri dari “cengkraman” sekularisme sendi-sendi kehidupan di tengah masyarakat, dengan menghilangkan pandangan *dichotomy of the knowledge* dalam bangunan kurikulum. Sebab menurut penulis, pandangan ini jika terus dipertahankan, justru akan memperkokoh paham sekularisme Agama bercokol di Negeri ini. Sebab setiap orang pada akhirnya akan bertindak tidak menurut ajaran Agama dalam hal-hal yang dinilai tidak masuk pada garapan Agama, dan Madin sebagai lembaga pendidikan Agama tentu akan terus ditinggalkan oleh masyarakat. Sudah waktunya Madin membuka diri, tidak lagi eksklusif, dan berlama-lama dalam tempurung yang tertutup. Segera ikut naik “gerbong” integrasi keilmuan, dimana tidak ada lagi pemisahan wilayah keilmuan antara ilmu Agama dengan ilmu-ilmu umum lainnya. Persinggungan keilmuan saat ini memang masih dalam taraf pengembangan gagasan²⁵, namun dengan perubahan

²³Hendrawan, Kurikulum Berbasis Kompetensi, hal. 6

²⁴ Priodeisasi perkembangan, keemasan dan degradasi Beragama, digambarkan terjadi setiap 6 abad. Pada 6 abad sebelum Masehi, dunia gelap gulita tanpa Agama (spirit Agama Yahudi sudah mati). 6 abad pertama (1 – 600 M.), sudah ada perkembangan dengan lahirnya Kristeani. Abad 7 – 12 M., adalah puncak peradaban Agama dengan lahirnya Islam. Pada priode ini Islam menjadi spirit dan inspirasi perkembangan dunia. Abad 13 – 19 M., dunia kembali kejurang peradaban dengan adanya *new jahiliyah* berupa kolonialisme dan sekularisme. Pada saat itu revolusi industri yang disinyalir akan membawa kesejahteraan, justru membawa dunia pada konflik global. Dan priode saat ini (abad 20 – 25 M.) adalah masa respiritualisme atau saya menyebut dengan “reinkarnasi Agama”. Sebab Agama kembali menjadi kesadaran universal. Mudjia Rahardjo, Tantangan Sarjana PTAI menyongsong Priode Respirtualisasi Global, *Makalah Orasi Ilmiah*, disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Wisuda TA. 2013/2014 STAI Al-Qolam Gondanglegi, tanggal 7 Desember 2013 (Gondanglegi: STAI Al-Qolam, 2013)

²⁵Dua pandangan integrasi keilmuan dalam Islam, yaitu islamisasi ilmu dan pengilmuan Islam. Secara substansial proses islamisasi ilmu telah berjalan sejak lahirnya Islam yang telah merubah tatanan jahiliyah menjadi tatanan Islam. Namun secara operasional, islamisasi ilmu baru digagas dalam konferensi pendidikan Islam di King Abdul Aziz University pada tahun 1977, yang

sikap ini, Madin telah melangkah lebih jauh untuk meraih potensinya. Dalam gagasan integrasi keilmuan, disepakati bahwa kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan Agama Islam, baik formal atau nonformal, harus bersifat integratif antara ilmu Agama dengan ilmu sains dan teknologi. Seorang Da'i misalnya, tidak hanya berkeperibadian sebagai "suri tauladan" panutan di tengah masyarakat, ilmuwan yang matang dalam bidangnya, namun juga harus dibekali dengan berbagai "ilmu penunjang" profesi, seperti ilmu komunikasi, teknologi komunikasi, manajemen konflik dan komunikasi politik, sehingga menjadi "Da'i Profesional". Oleh karenanya pengembangan konstruksi kurikulum dalam lembaga pendidikan Agama harus komprehensif dan sinergi dengan profil profesi yang dibutuhkan dalam masyarakat.

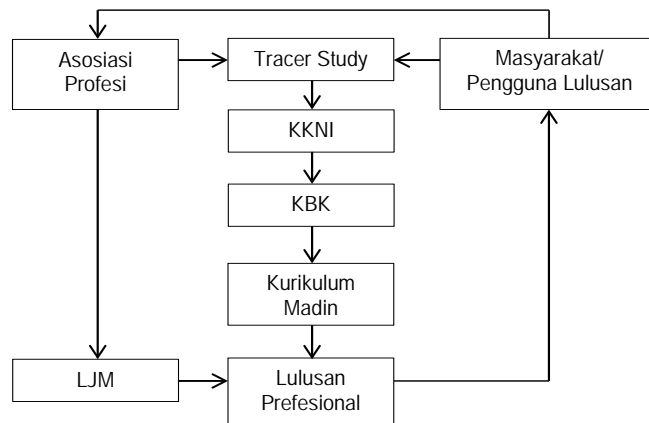
Dimulai dari Kurikulum

Perlu diperhatikan dan ditekankan kembali di sini, bahwa penggunaan model KBK yang mengacu pada KKNi dalam rekonstruksi bangunan kurikulum di Madin masih baru gagasan, atau hanya sekedar instrumen yang akan mewujudkan struktur bangunan kurikulum otonom yang dapat diakui dan disandingkan kualifikasinya dengan profesi yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini dan masa-masa mendatang. Sebab sampai makalah ini dibuat, masih belum ada perangkat regulasi penerapan KBK KKNi yang diterbitkan oleh Kemenag RI²⁶. Dengan demikian, rancangan dalam makalah ini dapat menjadi usulan dan rekomendasi bagi instansi terkait dalam pengembangan lembaga Madin yang dimulai dari kerja rekonstruksi kurikulum, tidak hanya tingkat

berhasil membahas 150 makalah dari 40 negara, dua diantaranya; makalah Muhammad Naquib al-Atthāsh "*Preliminary Thoughts on the Nature of Knowledge and the Definition and the Aims of Education*", dan gagasan Ismail R. al-Faruqi "*Islamicizing Social Knowledge*". Islamisasi ilmu menganggap ilmu pengetahuan hegemoni barat tidak netral dari kekufuran sehingga harus diislamkan kembali. Pandangan ini memperoleh kritik dari beberapa kalangan yang menilai pengetahuan yang berkembang adalah netral, ia akan tetap sama dari manapun berasal, seperti Fazlur Rahman, Abdus Salam, Pervez Hoodbhoy, dan Abdul Karim Soroush. Namun mereka gagal meletakkan landasan epistemologi gagasan mereka untuk menghadang hegemoni pengetahuan barat. Di Indonesia rancangan epistemologi berhasil dirampungkan oleh Kuntowijoyo dengan gagasan pengilmuan Islam dalam bukunya "Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika". Disadur dari: Ismail Thoib dan Mukhlis, "Dari Islamisasi Ilmu menuju Pengilmuan Islam: Melawan Hegemoni Epistemologi Barat", *Ulumuna: Jurnal Studi Islam*, 17 (Juni 2013), hal. 67-92. Diantara penggagas gigih integrasi keilmuan di Indonesia saat ini yang telah memiliki *blue print* bahkan *prototype* aplikasi dan implementasi gagasan mereka, antara lain Prof. Imam Suprayogo (mantan rektor UIN Maliki Malang) dan Prof. Amin Abdullah (mantan rektor UIN Suka Yogyakarta). Prof. Imam dengan "Pohon Ilmu", dan Prof. Amin dengan "Jaring Laba-laba" yang ia sebut dengan konsep Integrasi-Interkoneksi Keilmuan. Keduanya sering dipertemukan dalam satu forum dalam berbagai kesempatan, salah satunya pada acara Kuliah Umum, tanggal 3 Oktober 2013 di Sekolah Pasca Sarjana UIN Maliki Malang. Sampai penulisan makalah ini, masih banyak berlangsung kajian-kajian dan pengujian penerapan gagasan-gagasan itu di berbagai lembaga pendidikan. Di UIN Malang saat ini tengah digelar Sekolah Integrasi Islam dan Sains selama hampir dua bulan.

²⁶KKNi, Bab III, Pasal 9 ayat (3) berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan KKNi diatur oleh Menteri yang membidangi ketenagakerjaan dan menteri yang membidangi pendidikan baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya masing-masing. *Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 24 tahun 2012.

daerah, namun bahkan secara nasional. Disamping itu, tulisan ini dapat diproyeksikan nantinya dapat menjadi salah satu rujukan rumusan regulasi teknis penerapan KKNI, khususnya pada lembaga nonformal, seperti Madin.



Pada tahap *tracer study*²⁷, Madin harus memperhatikan jenjang kualifikasi sebagaimana yang ditunjukkan dalam KKNi. Artinya pelaksanaan penelitian tentang kebutuhan profil profesi yang dibutuhkan, harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan di Madin. Sebab capaian pembelajaran (*learning outcome*) pada Madin nantinya, selain didasarkan pada hasil *tracer study* juga harus mengacu pada diskriptor jenjang KKNi²⁸.

Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja²⁹.

Lembaga pendidikan nonformal, menurut Prof Hendrawan, menjadi salah satu sumber penetapan jenjang kualifikasi dalam KKNi yang nantinya akan terbentuk setelah *tracer study*, disamping lembaga formal, informal dan pengalaman kerja. Jenjang kualifikasi yang dirumuskan dalam KKNi adalah hasil kesepakatan secara nasional, sesuai dengan bentuk-bentuk lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Sehingga penggunaan jenjang tersebut sebagai patokan penjenjangan tingkat pendidikan untuk melakukan *tracer study* adalah instrumen yang tepat. Pernyataan inilah yang penting untuk disampaikan menurut penulis, terkait penggunaan KKNi dalam penentuan jenjang kualifikasi kompetensi di Madin, sebab menyatakan dengan tegas kontribusi urgen lembaga nonformal dalam pembentukan KKNi.

²⁷Studi Pelacakan (*tracer study*) adalah kegiatan penelusuran alumni untuk tujuan perbaikan kurikulum. Selain terhadap alumni, juga terhadap masyarakat (termasuk pemerintah) dan asosiasi profesi, dalam bentuk *market signal* dan *need analysis*.

²⁸Achmad Ridwan, "Menyelaraskan KBK dengan KKNi", www.rasto.staf.upi.edu/2013/09/01/menyelaraskan-KBK-dengan-KKNI/ (diakses pada 27 Desember 2013)

²⁹Hendrawan, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, hal. 13

Merujuk pada lampiran KKNi yang memuat Deskripsi Jenjang Kualifikasi KKNi, terdapat dua jenis kualifikasi yang dapat dipetakan penempatan jenjangnya; 1) deskripsi umum, yaitu kualifikasi yang wajib tetap dipenuhi dalam setiap jenjang, dan 2) deskripsi khusus, yang dipetakan dalam sembilan jenjang. Berikut gambaran pemetaan kualifikasi sesuai empat fenomena kompetensi;

	Anthropos	Tekne	Oikos	Etnos	
Deskripsi Umum	√	-	√	√	Soft Skill
1	-	√	-	√	Hard Skill
2	-	√	-	√	
3	-	√	√	√	
4	-	√	√	√	
5	-	√	√	√	
6	-	√	√	√	
7	-	√	√	√	
8	-	√	√	√	
9	-	√	√	√	

Dari tabel di atas dapat dipahami: *pertama*, deskripsi umum mencakup; beriman dan bertaqwa terhadap Allah Swt dan berakhlak mulia, dan berkepribadian yang baik dalam melaksanakan tugasnya (*anthropos*), cinta tanah air, berperan, mampu bekerja sama, peduli, dan menghargai orang lain (*oikos*), dan taat hukum serta mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat (*etnos*).

Kedua, deskripsi khusus mencakup; memiliki pengetahuan faktual dan operasional, sehingga mampu melaksanakan tugas, menguasai prinsip dan konsep teoritis bidang tertentu, sehingga mampu mengaplikasikan bidang keahliannya, mampu memecahkan permasalahan keilmuan monodisipliner, kemudian multidisipliner dan transdisipliner, sehingga mampu merencanakan dan mengelolan sumber daya, dan mengembangkan pengetahuan dan teknologi (*tekne*), mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan menulis laporan dengan baik (*oikos*), dan bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri, kemudian pekerjaan orang lain, dan mengambil keputusan dengan tepat (*etnos*).

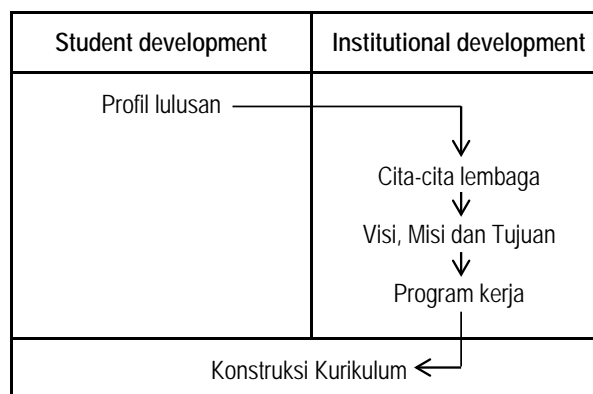
Deskripsi khusus kemudian dipetakan dalam suatu *framework* penjenjangan pendidikan, disebut dengan kerja “penyetaraan”, yang tidak ditetapkan secara jelas dalam KKNi dan belum ada regulasi turunannya mengenai hal ini dari kementerian atau sektor dan subsektor³⁰. Sehingga masih membuka peluang bagi Madin untuk merekomendasikan pemetaan penyetaraan pencapaian pembelajaran melalui pendidikan di Madin, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sebagai suatu usulan *framework* sementara, penulis dapat menentukan penyetaraan kualifikasi pendidikan Madin jika mengacu pada penjenjangan dalam KKNi sebagai instrumennya, termasuk gambaran katakter profil lulusan pada masing-masing jenjang, dan rancangan beberapa tingkat

³⁰Penyetaraan capaian pembelajaran melalui pendidikan yang dimaksud dalam KKNi Bab II pasal 5, hanya mengakomodir penyetaraan pada lembaga pendidikan formal. Capaian pembelajaran melalui pengalaman kerja, dapat ditentukan oleh sektor dan subsektor kementerian terkait.

pendidikan tinggi semacam Ma'had 'Ālī, mulai strata satu sampai doktoral, bahkan postdoktoral³¹.

Jenjang Kualifikasi	Jenjang Pendidikan Madin	Karakter Profil Lulusan
9	Ma'had 'Ālī (S3)	Scientific
8		
7		
6		
5	'Ulyā	Skillful
4	Wushthā	
3	Ūlā	
2	Isti'dādī	
1		

Lalu kenapa harus dimulai dari kurikulum?.Ini juga pertanyaan urgen yang harus penulis jelaskan, tidak perlu panjang lebar dalam makalah ini, namun perlu diikuti dengan contoh sederhana. Menurut penulis, peningkatan mutu lembaga pendidikan, *linier* dengan peningkatan kualitas SDM lulusannya, jika profil lulusan Madin sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pengguna lulusan, maka sudah tentu mutu Madin akan meningkat dengan sendirinya. Dititik inilah kenapa pengembangan lembaga Madin harus dimulai dari rekonstruksi kurikulum, di mana makalah ini merekomendasikan untuk menggunakan KBK KKNi sebagai instrumen paling tepat. Walaupun ada yang berpendapat bahwa kualitas SDM lulusan tidak tergantung sepenuhnya pada model kurikulum. Penulis sependapat dengan pandangan ini, namun bukan berarti tidak melakukan apa-apa dan hanya menunggu hasil yang baik, bukan?. Oleh karenanya perlu diperhatikan bahwa pengembangan lembaga (*institutional development*) yang dimaksudkan dalam makalah ini seperti terlihat dalam gambar;



Sebagai contoh aplikasi dari pengembangan konstruksi kurikulum di Madin, penulis dapat mengilustrasikan sebuah Madin fiktif, sebut saja Madin “Al-Tamtsīl”, tingkat pendidikan dasar (*darajah ūlā*). Sesuai dengan hasil *tracer study*

³¹ Menurut PP. nomor 55 tahun 2007, penyelenggaraan Madin berada pada semua jenjang pendidikan, mulai pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

terhadap pengguna lulusan dan alumni sebagai representasi dari asosiasi profesi³² Al-Tamtsīl, ditemukan bahwa profesi paling dominan dan dibutuhkan kedepan adalah “calon santri Madin tingkat wushthā unggulan”. Untuk menggapai profesi tersebut, sesuai dengan penjenjangan dan deskripsi kualifikasi yang ada dalam KKNI, maka lulusan al-Tamtsīl harus memiliki profil dengan kompetensi berikut:

Kompetensi Khusus	beriman dan bertaqwa terhadap Allah Swt, berakhlak mulia, dan berkepribadian yang baik dalam melaksanakan tugasnya (<i>anthropos</i>), hidup harmonis dan berwawasan kebangsaan (<i>oikos</i>), dan berperilaku sesuai norma dan hukum (<i>etnos</i>)	untuk itu harus memiliki <ol style="list-style-type: none"> 1. pengetahuan operasional tentang gramatikal dasar Bahasa Arab, metode terjemah dasar, menghitung tingkat dasar, Bahasa Indonesia dasar, Bahasa Arab dasar, Bahasa Inggris dasar, dan ilmu komputer dasar. 2. pengetahuan faktual tentang Aqidah Islam dasar, Akhlak dasar, hukum Islam dasar, sejarah Islam dasar dan <i>civic education</i> dasar 3. pengalaman bekerja sama dan bertanggung jawab
Kompetensi Utama	mampu membaca teks Bahasa Arab tingkat dasar, menerjemahkannya (minimal dengan bahasa jawa), memberikan sedikit penjelasan terstruktur mengenai Aqidah Islam dasar, Akhlak dasar, hukum Islam dasar, sejarah Islam dasar, dan <i>civic education</i> dasar (<i>tekne</i>), mampu bekerja sama, berkomunikasi dengan baik dalam lingkungannya (<i>oikos</i>), dan bertanggung jawab atas bacaan, terjemahan dan penjelasannya (<i>etnos</i>)	
Kompetensi Penunjang	mampu menghitung tingkat dasar, berbahasa Indonesia dasar dengan baik, berbahasa Arab dasar, berbahasa Inggris dasar, dan mengoperasikan komputer tingkat dasar (<i>tekne</i>)	

Dari ilustrasi pengembangan kurikulum dari penentuan kompetensi berdasarkan profil profesi yang diharapkan, Madin al-Tamtsīl kemudian dapat menentukan cita-citanya secara institusional, mengkodekannya dalam bahasa visi, misi dan tujuan, dan menerjemahkannya dalam bentuk rancangan program dan anggaran yang riil.

Penutup

Kenyataan bahwa kondisi riil Madin yang masih banyak belum berkualitas, dan masih dianggap sebagai lembaga sampingan (pendamping lembaga pendidikan formal), yang kemungkinan disebabkan oleh model pembelajarannya yang masih konvensional, dan sifatnya yang eksklusif. Maka sangat diperlukan solusi tepat untuk pengembangan potensi Madin. Makalah ini

³² Asosiasi Profesi sebenarnya secara sederhana dapat diasosiasikan sepihak dengan memilih alumni-alumni yang dinilai berhasil tidak lama setelah lulus dari lembaga. Dan profesi yang dimaksud juga secara sederhana dapat diterjemahkan dari konteks keberhasilan tersebut.

merekomendasikan pengembangan kurikulum Madin dengan menggunakan KBK KKNI sebagai instrumennya, yang diharapkan menjadi *pilot project of institutional development* pada lembaga nonformal khususnya Madin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, “Integrasi Interkoneksi Keilmuan”, *Makalah*, disampaikan dalam Kuliah Umum dengan tema Pengembangan Pendidikan di Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana UIN Maliki Malang, pada tanggal 3 Oktober 2013
- Coward, Harold G., *Pluralism: Challenge to World Religions*, terj. Basco, *Pluralisme: Tantangan bagi Agama-Agama*, Jakarta: Kanisius, 1992.
- Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kemenag RI, *Analisis dan interpretasi Data pada Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, dan TPQ tahun 2011 – 2012*, Jakarta: Pendis, 2012
- Fakih, Mansour, *Jalan Lain*, cetakan 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Kromosudiro, Fauzi, “Konsep Dasar KKNI”, (Online), www.fauziep.com/konsep-dasar-kkni/, diakses pada 27 Desember 2013
- Mudlofir, Ali, “Tafsir Tarbawi sebagai Paradigma Qur’ani dalam Reformulasi Pendidikan Islam”, *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 11 no. 2, November 2011
- Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja, “F.A.Q.”, (Online), www.penyelarasan.kemdiknas.go.id/home/faq.html, diakses pada 27 Desember 2013
- Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 24 tahun 2012.
- Rahardjo, Mudjia, “Tantangan Sarjana PTAI menyongsong Priode Respiritualisasi Global”, *Makalah*, disampaikan pada Rapat Senat Terbuka Wisuda TA. 2013/2014 yang selenggarakan oleh STAI Al-Qolam Gondanglegi, tanggal 7 Desember 2013
- Ridwan, Achmad, “Menyelaraskan KBK dengan KKNI”, (Online), www.rasto.staf.upi.edu/2013/09/01/menyelaraskan-KBK-dengan-KKNI/, diakses pada 27 Desember 2013
- Soetanto, Hendrawan, “Kurikulum Berbasis Kompetensi dalam kaitannya dengan KKNI”, *Makalah*, disajikan pada Lokakarya Pengembangan Kurikulum PTAIS yang selenggarakan oleh KOPERTAIS IV Surabaya, pada tanggal 11 November 2013
- Tilaar, H.A.R., *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Bandung: Rineka Cipta, 2004

UNDP, *Summary Human Development Report 2013. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World*, New York: UNDP, 2013

World Economic Forum, *The Global Competitiveness Report 2012–2013*, Jenewa: World Economic Forum, 2012